

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kasus narkoba mendapat tantangan luar negeri, rencana terhadap dua orang terpidana warga Australia Myuran Sukumaran dan Andrew Chan terkait kasus narkoba di Bali nine. Keduanya dibekuk di Bandara Ngurah Rai Bali, pada 2005 bersama anggota kelompok Bali Nine lainnya. Mereka tertangkap saat hendak menyelundupkan 8,3kg heroin dari Bali ke Australia. Pemerintah dan publik Australia melakukan tekanan dan upaya-upaya diplomatik.

Kedua terpidana Myuran Sukumaran dan Andrew Chan adalah pelaku drug trafficking yang ditangkap oleh kepolisian Indonesia atas adanya kerjasama dengan Australia Federal Police (AFP) dan diserahkannya data intelijen. Jaringan Bali Nine ini ditangkap pada 17 April 2005 di Provinsi Bali. Kemudian Pada 13 Februari 2006, Pengadilan Negeri Denpasar Bali memvonis keduanya dengan hukuman mati. Namun tidak serta merta kedua anggota Bali Nine menerima putusan hakim Pengadilan Negeri Denpasar Bali. Pada tanggal 26 April 2006, keduanya mengajukan banding Mahkamah Agung tetapi vonis yang dijatuhkan masih sama dengan keputusan sebelumnya.

Segala cara hukum sudah ditempuh oleh pihak kuasa hukum duo Bali Nine untuk mengagalkan vonis pengadilan, dengan upaya terakhir yaitu mengajukan grasi ke Presiden Jokowi. Namun lagi-lagi upaya ini tidak

membuahkan hasil bagi pembebasan keduanya dari hukuman mati. Langkah selanjutnya yang ditempuh untuk membebaskan dua anggota Bali Nine ini ialah dengan diplomasi antara dua negara, yaitu antar negara asal Bali Nine Australia dan negara dimana dua Bali Nine akan dieksekusi, Indonesia.

Pemerintah Australia dibawah kepemimpinan Perdana Menteri Tony Abott melakukan berbagai cara untuk berdiplomasi dengan Indonesia guna membebaskan Dua anggota Bali Nine. Langkah pertama yang dilakukan Australia adalah pendekatan antar kepala negara. Dalam upaya pembebasan dua warga negaranya, Perdana Menteri Tony Abott menelpon secara langsung kepada Presiden Jokowi untuk meminta agar Indonesia mengampuni dua warga negaranya. Hal itu diikuti oleh Mentri luar negeri Australia, Julia Bishop yang juga menelepon menteri luar negeri Indonesia, Retno Marsudi. Namun upaya ini gagal karena Jokowi secara tegas menolak pengampunan terhadap keduanya.

Langkah kedua, Australia mengancam akan memboikot salah satu tempat wisata terindah di Indonesia yaitu Bali. Bahkan pemerintah Australia sudah mengkampanyekan boikot terhadap Bali di Media Sosial Twitter jika Indonesia tidak mengampuni kedua terpidana. Tetapi hal ini tidak berhasil, karena mayoritas rakyat Australia tidak ingin bergabung dalam boikot terhadap Bali. Setelah gagal menggunakan jurus boikot Bali.

Kemudian pemerintah Australia menggunakan langkah ketiga yaitu meminta bantuan kepada PBB untuk menyerukan supaya pemerintah Indonesia menghentikan hukuman mati dan memberikan pengampunan dan hal ini disampaikan Sekjen PBB, Ban Ki-moon, dimana dia menghimbau agar

pemerintah Indonesia menghentikan pelaksanaan hukuman mati. Namun Indonesia membalas himbauan Sekjen PBB ini bahwa Indonesia tidak akan menghentikan hukuman mati, karena hal tersebut merupakan wilayah kedaulatan hukum di Indonesia, dan Indonesia juga beralasan bahwa hukuman mati masih diterapkan beberapa negara di dunia termasuk Amerika Serikat. Dengan alasan ini, Indonesia bersikap keras bahwa tetap akan melaksanakan hukuman mati.

Setelah langkah Australia yang mengancam tidak dapat meluluhkan hukum di Indonesia, Pemerintah Australia menggunakan langkah keenam, yaitu dengan mengungkit kembali bantuan Tsunami yang diberikan oleh pemerintah Australia pada saat terjadi Tsunami di Aceh pada tahun 2004 lalu. Pemerintah Australia meminta, sebagai sahabat baik yang saling membantu. Sebaiknya Indonesia dapat membalas kebaikan Australia di masa lalu dengan memberi pengampunan terhadap dua anggota Bali Nine. Namun lagi-lagi, upaya Australia ini justru mempermalukan Australia sendiri. Karena rakyat Indonesia menganggap himbauan ini sebagai niat buruk Australia, dan kemudian muncul gerakan koin untuk Australia sebagai sarkasme atas tindakan Tony Abott.

Langkah ketujuh Australia adalah dengan mengirimkan Grand Mufti Sunni of Australia ke Indonesia. Australia menyadari bahwa salah satu alasan Jokowi bersikeras untuk melaksanakan hukuman mati adalah karena adanya dukungan dari Kyai NU dan Muhammadiyah, Sehingga Australia yang melihat kesempatan ini menggunakan Ulama Islam sebagai pendekatan diplomasi untuk menawar eksekusi mati terhadap Bali Nine. Tetapi upaya ini juga gagal, karena Grand Mufti Australia hanya diberi kesempatan untuk bertemu dengan menteri

agama yang tidak memiliki kewenangan apapun terhadap keputusan eksekusi Bali Nine.

Langkah kedelapan yang ditempuh Australia adalah dengan menawarkan Barter tahanan Indonesia di Australia yang akan ditukar dengan dua anggota Bali Nine untuk tidak dieksekusi mati di Indonesia. Tentu saja, hal ini ditolak oleh pemerintah Indonesia karena, tidak sedang dalam perang. Sehingga tukar tahanan sangat tidak tepat.

Langkah kesembilan yang dilakukan Australia adalah dengan memohon kepada Indonesia agar tidak mengeksekusi mati dua Bali Nine. Sebagai kompensasinya, Australia akan membiayai kebutuhan seumur hidup dua Bali Nine di Penjara. Upaya terakhir ini juga ditolak oleh pemerintah Indonesia.

Pemerintah Australia mengupayakan pembebasan terhadap anggota dua Bali Nine dengan pendekatan diplomasi yang bervariasi. Namun semua itu tidak dapat meluluhkan pemerintah Indonesia, yang beralasan bahwa kedaulatan hukum di Indonesia tidak dapat diintervensi oleh negara lain. Dengan beberapa diplomasi tambahan seperti ini, akan mengancam membeberkan rahasia Jokowi di pemilihan presiden 2014. Nampaknya membuat pemerintah Indonesia menunda eksekusi mati, meskipun pemerintah membantah kabar ini. Untuk kepastian waktu eksekusi mati menunggu gugatan terakhir kuasa hukum Bali Nine terhadap Keputusan Jokowi yang menolak menerima Grasi tanpa mempelajari isi Grasi terlebih dahulu.

Dari paparan tersebut, tampak usaha keras Australia untuk membatalkan eksekusi. Namun pemerintahan Jokowi tetap melaksanakan eksekusi Myuran

Sukumaran dan Andrew Chan keputusan hukuman tembak mati pada Minggu dini hari tanggal 18 Januari 2015.¹

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka masalah penelitian di skripsi ini akan dirumuskan dalam kalimat sebagai berikut:

Mengapa meski ada keberatan dan upaya-upaya diplomatik Australia, Presiden Joko Widodo tetap tegas mengeksekusi dua terpidana mati kasus narkoba dari Australia, Myuran Sukumaran dan Andrew Chan ?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui alasan mengapa meski ada keberatan dan upaya-upaya diplomatik Australia, Presiden Joko Widodo tetap tegas mengeksekusi dua terpidana mati kasus narkoba dari Australia, Myuran Sukumaran dan Andrew Chan

D. Kerangka Teori

D.1 Politik luar negeri

Secara singkat politik luar negeri didefinisikan sebagai kebijakan yang diambil suatu negara terhadap lingkungan eksternalnya untuk memenuhi kebutuhan domestik. Jack C. Plano dan Roy Olton mendefinisikan politik luar

1

Kompas TV, "Ini Kronologi Kasus Narkoba Kelompok Bali Nine", URL: <http://regional.kompas.com/read/2015/04/29/06330021/Ini.Kronologi.Kasus.Narkoba.Kelompok.Bali.Nine>. Diakses Tanggal 16 Januari 2016

negeri sebagai “strategi atau tindakan terencana yang dikembangkan oleh para pembuat keputusan, yang ditujukan untuk mencapai tujuan tertentu sesuai dengan tujuan nasional². Politik luar negeri oleh Holsti diartikan sebagai analisa tentang tindakan atau pelaku suatu negara terhadap lingkungan eksternalnya berdasarkan kondisi-kondisi dalam negerinya³.

Politik dalam negeri dengan demikian sebenarnya bisa dilihat sebagai upaya untuk memenuhi tujuan negara yaitu melindungi dan mensejahterakan rakyatnya. Upaya itu sudah pasti secara teoritis dan praktis tidak bisa dipenuhi oleh lingkungan domestik semata. Tidak ada manusia yang bisa hidup sendiri, demikian pula negara. Oleh karena itu, pelarian ke luar menjadi suatu kebutuhan. Kebutuhan memenuhi tugas negara bisa disebut kepentingan nasional sementara alat pemenuhan domestik biasa dikonsepsikan dalam kekuatan nasional. Tulus Warsito kemudian memformulasikan politik luar negeri sebagai penyeimbangan atau pemenuhan selisih antara kuantitas dan kualitas kepentingan nasional dengan kekuatan nasional⁴. Jadi fokus perhatian pada politik luar negeri adalah apa yang menjadi kebutuhan suatu negara, sehingga negara perlu memenuhinya dari luar. Analisa permasalahannya didasarkan pada kepentingan salah satu negara dalam mencapai tujuan tertentu.

Kegley dan Wittkopf mengategorikan faktor - faktor yang membentuk politik luar negeri ke dalam tiga tingkat. **Pertama**, level internasional atau eksternal berkaitan dengan karakteristik dan segi - segi sistem internasional.

² Jack. C. Plano dan Roy Olton, *Kamus Hubungan Internasional*, Putra a Bardin, 1999.

³ K.J. Holsti, *International Politics: A Framework for Analysis* (new delhi: Prenticehall of India, 1964), h. 17-18.

⁴ Tulus Warsito, *Teori-teori Politik Luar Negeri* (Yogyakarta: Bigraf Publishing, 1998), h. 29.

Pengaruh internasional ini berkaitan dengan semua aktifitas yang terjadi di luar batas negara yang menjadi kerangka pilihan kebijakan, atau dengan kata lain kondisi yang melingkupi pembuatan keputusan mencakup hubungan antar negara dan perubahan-perubahan temporer dalam hubungan itu. Berbagai politik luar negeri, negara-negara di dunia pada akhirnya bersinergi membentuk politik internasional sekaligus menjadi fenomena hubungan internasional⁵. Politik luar negeri bisa merupakan aksi maupun upaya negara untuk mengadaptasikan diri terhadap lingkungan internasional sekaligus untuk memberi kontribusi terhadap perubahan-perubahan sistem internasional. Jadi ini merupakan siklus yang berputar yang saling mempengaruhi.

Kedua, pengaruh domestik berkaitan dengan karakteristik domestik yakni aktifitas yang terjadi di tingkat negara atau hal yang mempengaruhi pilihan kebijakan yang ingin dicapai seperti tipe sistem politik, opini rakyat, kemampuan militer, dan tingkat perkembangan ekonomi. Dalam konteks ini, politik luar negeri sering dipandang sebagai respon terhadap kebutuhan domestik. Oleh karenanya kebijakan dipandang bisa dijelaskan dengan menelaah kondisi-kondisi dalam negeri seperti tekanan-tekanan politik, ideologi, opini publik, atau kebutuhan ekonomi dan sosial. Sasaran politik luar negeri ataupun perilaku diplomatik merupakan suatu reaksi terhadap pendapat dalam negeri atau sikap publik sebagai komponen penting definisi situasi. Suatu bagian penting hubungan antara

⁵ Lihat lagi perbebedaan definisi politik luar negeri, politik internasional, dan hubungan internasional dalam Tulus Wasito, *Teori Politik Luar Negeri dan Keterbatasannya* (Yogyakarta: Bigraf, 1994)

pendapat public dan politik dimana semua informasi dikendalikan oleh pemerintah, pendapat publik terutama memainkan fungsi mendukung⁶.

Ketiga, level individu berkaitan dengan karakteristik pemimpin seperti kepercayaan, nilai, dan personalitasnya yang membentuk persepsi pemimpin dan jangkauan pilihan yang diambil. Dalam konteks ini, analisa lebih bersifat mikro. Dalam konteks yang lebih luas level individu mengandung makna juga seluruh pembuat keputusan (*descision maker*) yang terlibat dalam politik luar negeri ini. Pengambilan keputusan politik luar negeri merupakan campuran antara kebijakan keputusan yang bersifat kritis. Posisi kebijakan luar negeri umum merupakan produk dari tindakan-tindakan yang diambil oleh pejabat administratif dari tingkat produk yang lebih rendah sebagai bagian dari kegiatan rutin mereka seperti produk keputusan yang diambil pada masa krisis⁷. Para perumus kebijakan luar negeri adalah orang-orang yang dihadapkan kepada situasi-situasi tertentu yang bertanggung jawab kepada orang lain yang ditekan oleh beragam kondisi dan yang dipaksa untuk mengambil keputusan⁸.

D.2 Kepentingan Nasional

Dalam kajian hubungan internasional, tujuan negara lebih sering disebut dalam konsep kepentingan nasional (*national interest*). Kaitan antara kebutuhan, kemampuan untuk memenuhi dalam konteks politik luar negeri sangat berhubungan. Secara konseptual, kemampuan domestik dalam memenuhi

⁶ K.J.Holsti, *Politik Internasioanl Kerangka untuk Analisis*, Jakarta, Penerbit Erlangga, 1998, hal.117.

⁷ Wiliam d Colpin, *Pengantar Politik Internasional suatu telaah teoritis*, Bandung: Sinar Baru Algensindo,2003,hal.36.

⁸ *Ibid*,hal.23

kebutuhan, tuntutan, dan konsekuensi domestik biasa dikonsepsikan dalam kepentingan nasional. Oleh karena *nasional interest* tidak akan pernah terpengaruhi oleh *national power*, maka pemenuhan ke luar menjadi satu keniscayaan. Di titik ini, politik luar negeri kemudian dibaca sebagai pemenuhan atau penyeimbangan selisih antara kuantitas dan kualitas kepentingan nasional dengan kekuatan nasional⁹. (PLN= Kepentingan nas.-kekuatan nas.)

Sentralnya posisi kepentingan nasional dalam analisa politik luar negeri menyebabkan konsep ini sering dianggap sebagai kata kunci (*key concept*) atau terkadang *the starting point* dari politik luar negeri¹⁰. Sebagai sebuah konsep, kepentingan nasional cukup banyak diperdebatkan. Penulis seperti Spanier lebih memilih konsep tujuan (*objectives*) untuk merujuk hal-hal yang dicari negara dalam pergaulan internasional. Menurutnya, tujuan negara meliputi empat hal berikut:

1. Pencarian keamanan nasional (*national security*). Menurut Spanier keamanan nasional ini memiliki tiga “varian” yaitu keamanan fisik negara (*physical survival*), penjagaan integritas teritorial negara (*preseving state’s teritorial integrity*), dan kemerdekaan politik (*state’s politial independence*).
2. Martabat atau citra negara (*prestige*). Karena sangat terkait dengan *power*, maka Spanier mendefinisikannya sebagai *nation’s reputation for power*.

⁹ Tulus Warsito, teori-teori Politik Luar Negeri: Relevansi dan Keterbatasannya (Yogyakarta: Bigraf, 1998), hal.29.

¹⁰ Prakash Chandra, *Internasional Politics* (New Delhi: Vikas Publising, 1982), h. 32

3. Kesejahteraan ekonomi atau kemakmuran (economic wealth or prosperity).
4. Perlindungan dan penyebaran ideologi (protection and promotion of ideology).¹¹

E. Metode Penelitian

E.1. Tipe Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif kualitatif, dimana peneliti akan bekerja dengan informasi-informasi data dan menganalisa tidak menggunakan data statistik.

E.2. Sumber Data

Apabila ditinjau dari asal sumbernya, maka data dalam penelitian ini bersumber dari data sekunder, yakni data yang diperoleh peneliti dari sumber yang tidak langsung, yaitu dari berbagai buku, jurnal, dokumen, internet, dan artikel kliping yang sesuai dengan masalah yang diteliti. Dengan begitu peneliti menyalin data dari beberapa artikel, jurnal, dokumen, buku, maupun internet yang berkaitan dengan duo bali nine Myuran sukumaran dan Andrew Chan terkait kasus narkoba.

¹¹ John Spanier, Op. Cit. H. 58.

E.3. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini mempergunakan teknik dokumentasi.

E.4. Teknik Analisa Data

Penelitian ini dianalisa dengan teknik analisa deskriptif kualitatif, yang berarti data dan fakta yang diperoleh dan berdasarkan teori akan dianalisa secara sistematis, sehingga dapat memperlihatkan hubungan atau kolerasi antara fakta yang satu dengan fakta yang lain.

F. Sistematika Penulisan

Penulisan penelitian ini ditulis secara sistematis berdasarkan sistematika sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Bab I merupakan bab pendahuluan yang berisi :

- a. Latar belakang masalah
- b. Rumusan masalah
- c. Tujuan penelitian
- d. Kerangka teori
- e. Metode penelitian
- f. Sistematika penulisan

Bab II : Gambaran Umum Kasus Hukum Myuran Sukumaran dan Andrew Chan

Bab III : Ketegasan Pemerintahan Joko Widodo Mengeksekusi Mati Terpidana narkoba Asal Australia Tahun 2015

Bab IV : Kesimpulan

